

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Perjalanan pembangunan DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2002-2007 diproyeksikan dalam 2 tahapan pembangunan. Berdasarkan indikator makro yang dihasilkan, menunjukkan bahwa pada periode tahun 2002-2004 pembangunan masih akan difokuskan pada upaya memulihkan dan memantapkan perekonomian daerah (*recovery and stabilization*). Dalam tahapan ini, perbaikan infra struktur sosial ekonomi dan peningkatan pelayanan publik akan menjadi perhatian utama. Selanjutnya pada periode 2005-2007 adalah masa pemantapan yang ditandai dengan penguatan fundamental sosial dan ekonomi untuk mendukung stabilisasi pembangunan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari kondisi dan indikasi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan DKI Jakarta pada tahun 2003 secara umum diarahkan kepada upaya Pemerintah Daerah untuk pemulihan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta momentum keberhasilan pertumbuhan yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya pemulihan ekonomi daerah ini diperlukan mengingat masih adanya masalah-masalah sosial dan ekonomi mendasar, yang timbul selama krisis, dan belum terpecahkan, seperti kelompok masyarakat miskin, pengangguran terbuka, perlambatan investasi serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum memadai secara umum.

Selanjutnya kualitas prasarana sosial seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama perlu mendapat perhatian, karena berkaitan dengan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan. Pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin, untuk berpartisipasi sekaligus meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian kebijakan pembangunan yang diarahkan kepada investasi dalam bidang sarana dan prasarana publik, akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi dan tantangan globalisasi memerlukan dukungan keamanan dan ketertiban umum (*public order*). Di lain pihak, keamanan dan ketertiban

umum diperlukan pula untukantisipasi pemilu 2004, serta upaya pemantapan persatuan dan kesatuan. Untuk itu, peningkatan kelembagaan dan koordinasi antar instansi keamanan termasuk dalam rangka penegakkan hukum dan HAM, perlu mendapat perhatian khusus.

Sejak timbulnya krisis ekonomi, penyediaan dan pemeliharaan pada hampir semua sarana dan prasarana publik baik dalam jumlah maupun kualitasnya, terus mengalami penurunan. Jika hal ini terus berlanjut dan tidak segera dapat diatasi, maka investasi di sektor ekonomi yang memerlukan dukungan jasa sarana dan prasarana, juga akan terganggu, sehingga prospek pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Penurunan kualitas pelayanan prasarana dan sarana publik juga berakibat pada meningkatnya biaya produksi dan beban hidup masyarakat.

Perubahan dan proses reformasi menuju good governance menuntut peran dan eksistensi aparatur daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerinthan untuk mampu memahami kondisi objektif lingkungan masyarakatnya. Aparatur daerah diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan terjadinya perubahan pada pelayanan publik yang lebih adil, netral, profesional, efisien, efektif, produktif, transparan serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan APBD DKI Jakarta tahun 2003 memuat 5 (lima) hal pokok, yaitu :

1. Pemulihan perekonomian daerah yang diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi semua elemen masyarakat, dan penyediaan kebutuhan dasar yang lebih memadai dengan fokus pada peningkatan investasi daerah, pemberdayaan PD/BUMD/PT Patungan serta iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi yang efisien dan produktif.
2. Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan kesehatan serta daya jangkauannya ke segenap warga kota melalui keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, dan peningkatan kualitas kehidupan beragama serta kesejahteraan masyarakat.
3. Perbaikan sarana dan prasarana kota, dengan fokus pada rehabilitasi sarana yang belum berfungsi secara baik serta penyebaran dan perluasan fasilitas pelayanan kota

yang lebih adil dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.

4. Peningkatan ketertiban umum, dengan fokus pada peningkatan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan, penanggulangan bencana dan kebakaran serta peningkatan solidaritas untuk mendorong terciptanya kerukunan warga kota.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan kota secara bertahap, teratur, strategis, dan berkelanjutan dengan membuka ruang bagi partisipasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.